

PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Sektor Perencanaan dan Penganggaran APBD

Pimpinan KPK
Hotel Shangrila Surabaya, 4 Maret 2020



ARAHAN PRESIDEN



Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019)

1



Perpres Stranas mengandung semangat kolaborasi jangan lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi

Strategi Nasional ini tidak boleh hanya jadi dokumen, laksanakan segera. Rakyat ingin Indonesia segera bebas dari korupsi



Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024
(Senayan, 20 Oktober 2019)

2



“Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent”

“Program harus dijalankan, dan masyarakat menerima manfaat”

5 Arah Pemerintah 2019-2024

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan birokrasi, dan
- 5) Transformasi ekonomi

TUJUAN NASIONAL INDONESIA (UUD RI 1945)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

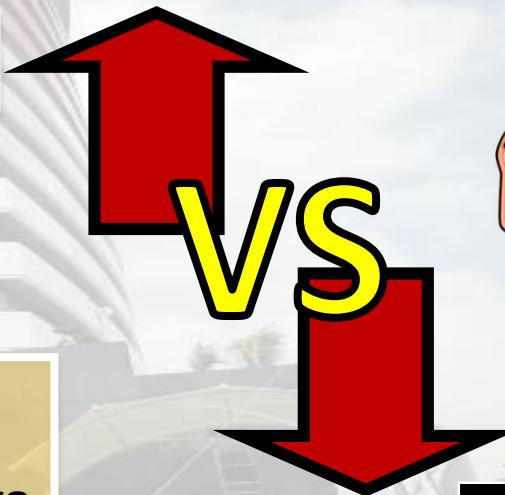
POWER TENDS CORRUPTS

ABSOLUTE POWER, CORRUPTS ABSOLUTELY



CORRUPTION = POWER + OPPORTUNITY - INTEGRITAS

Integritas



Integritas

(Kesatuan atau keselarasan antara pikiran, kata, perbuatan dan hati nurani)

Korupsi



PELAKU KORUPSI

2004 - 2019

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019

DPR/DPRD
255

Es.I/II/III
203

Walkot/
Bupati &
Wakilnya
108

Hakim
22

Pengacara
11

Jaksa
7

Korporasi
6

Swasta
258

Lainnya
114

Menteri/
Kepala K/L
27

Gubernur
20

Komisioner
7

Dubes
4

Polisi
2





KERANGKA KONSEPTUAL

TEORI
G REED
O PPORTUNITY
N EED
E XPOSURE

CAPTURE THEORY (AMLE O KRUEGER)

“SEGALA
SESUATUNYA DI
ATAS KERTAS
SECARA YURIDIS
FORMAL ADALAH
SAH DAN LEGAL”



TEORI INI BANYAK DISALAHGUNAKAN UTK
MEMULUSKAN KEPENTINGAN BEBERAPA
PIHAK. ALASAN MELAKUKAN FRAUD TDK
DPT SEPENUHNYA DIPISAKHAN DR
KONTEKS SOSIAL & PERILAKU INDIVIDU.

TEORI GONE:

1. **GREED (KESERAKAHAN)**; KESERAKAHAN DAN KERAKUSAN PARA PELAKU KORUPSI YANG SECARA POTENSIAL ADA DALAM DIRI SETIAP ORANG.
2. **OPPORTUNITY (KESEMPATAN)**; SISTEM YANG MEMBERI LUBANG TERJADINYA KORUPSI, YANG BERKAITAN DENGAN KEADAAN ORGANISASI/INSTANSI ATAU LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MEMBUKA KESEMPATAN BAGI SESEORANG UNTUK MELAKUKAN KECURANGAN.
3. **NEED (KEBUTUHAN)**; SIKAP MENTAL YANG TIDAK PERNAH CUKUP, PUHU SIKAP KONSUMERISME, DAN SELALU SARAT KEBUTUHAN YANG TAK PERNAH USAI.
4. **EXPOSURE (HUKUMAN PD PELAKU KORUPSI YANG RENDAH)**; HUKUMAN YANG TIDAK MEMBUAT JERA PELAKU MAUPUN ORANG LAIN, DAN *DETERRENCE EFFECT* YANG MINIM.

TEORI KEBIJAKAN SOSIAL (DAVID GILL)

TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL → TERDAPAT PERANGKAT 6
MEKANISME KEMASYARAKATAN YG PERLU DIUBAH:

1. PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER; KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN PILIHAN-PILIHAN TINDAKAN BERKENAAN DENGAN JENIS, KUALITAS, DAN KUANTITAS SEMUA BARANG-BARANG DAN PELAYANAN-PELAYANAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.
2. PENGALOKASIAN STATUS; MENYANGKUT PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES SERTA KETERBUKAAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN AKSES TERSEBUT BAGI ANGGOTA MASYARAKAT. KEBIJAKAN SOSIAL HARUS MEMILIKI EFEK PADA PENGHILANGAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI.
3. PENDISTRIBUSIAN HAK; MENUNJUK PADA PERLUASAN KESEMPATAN INDIVIDU KELOMPOK DALAM MENGONTROL SUMBER-SUMBER MATERIAL DAN NON MATERIAL.

KORUPSI DI INDONESIA

1. KARENA SISTEM YANG SALAH. KESALAHAN SISTEM TERSEBUT BISA KARENA SISTEMNYA LEMAH, ATAU GAGAL, ATAU KARENA MEMANG SISTEMNYA BURUK.
2. KARENA FAKTOR DOMINAN PERILAKU, YAITU SIFAT KERAKUSAN (GREED) DAN PELUANG (OPPORTUNITY).
3. KARENA MEKANISME PENCEGAHAN YANG LEMAH ATAU TIDAK OPTIMAL.

STRANAS PK

**PERPRES
55/2012**

Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014

**PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 54
TAHUN 2018**

**TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI**

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia.

FOKUS STRANAS PK:

- TERFOKUS**
- TERUKUR**
- BERDAMPAK**



PERIJINAN & TATA NIAGA



KEUANGAN NEGARA



**PENEGERAKAN HUKUM &
REFORMASI BIROKRASI**

Kegiatan harian, pelatihan, monitoring, output dan outcome delivery

koordinasi,
sinkronisasi, evaluasi

Presiden Republik Indonesia



Tim Nasional



Koordinator Tim Nasional

Top eselon dari
5 Kementerian Lembaga



Sekretariat Nasional

Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L,
Tim Administrasi

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENCEGAHAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)

Rp 159 miliar

Gratifikasi Uang dan Barang

Rp 29 triliun

Optimalisasi Pendapatan Daerah dari
pajak hotel, restoran; piutang pajak,
fasum fasos, sengketa aset

Rp 34,7 triliun

Potensi penyelamatan
berdasarkan hasil Litbang

Rp 63,9 triliun

Total keseluruhan

**Pencegahan
Korupsi dan
Penyelamatan
Kerugian
Negara**



AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

3

FOKUS

Perizinan dan Tata Niaga

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Keuangan Negara

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

Setiap aksi didetaillkan dengan target triwulan sampai dengan Akhir 2020

- 3 -

h. optimisasi penerimaan negara dari penciran pajak dan non-pajak;
 i. penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 j. implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa; dan
 k. perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.

: Uraian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 tercantum dalam Lampiran Keputusan bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

: Kementerian, Lembaga, Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan realisasi capaian target pada akhir setiap triwulan.

: Timnas PK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

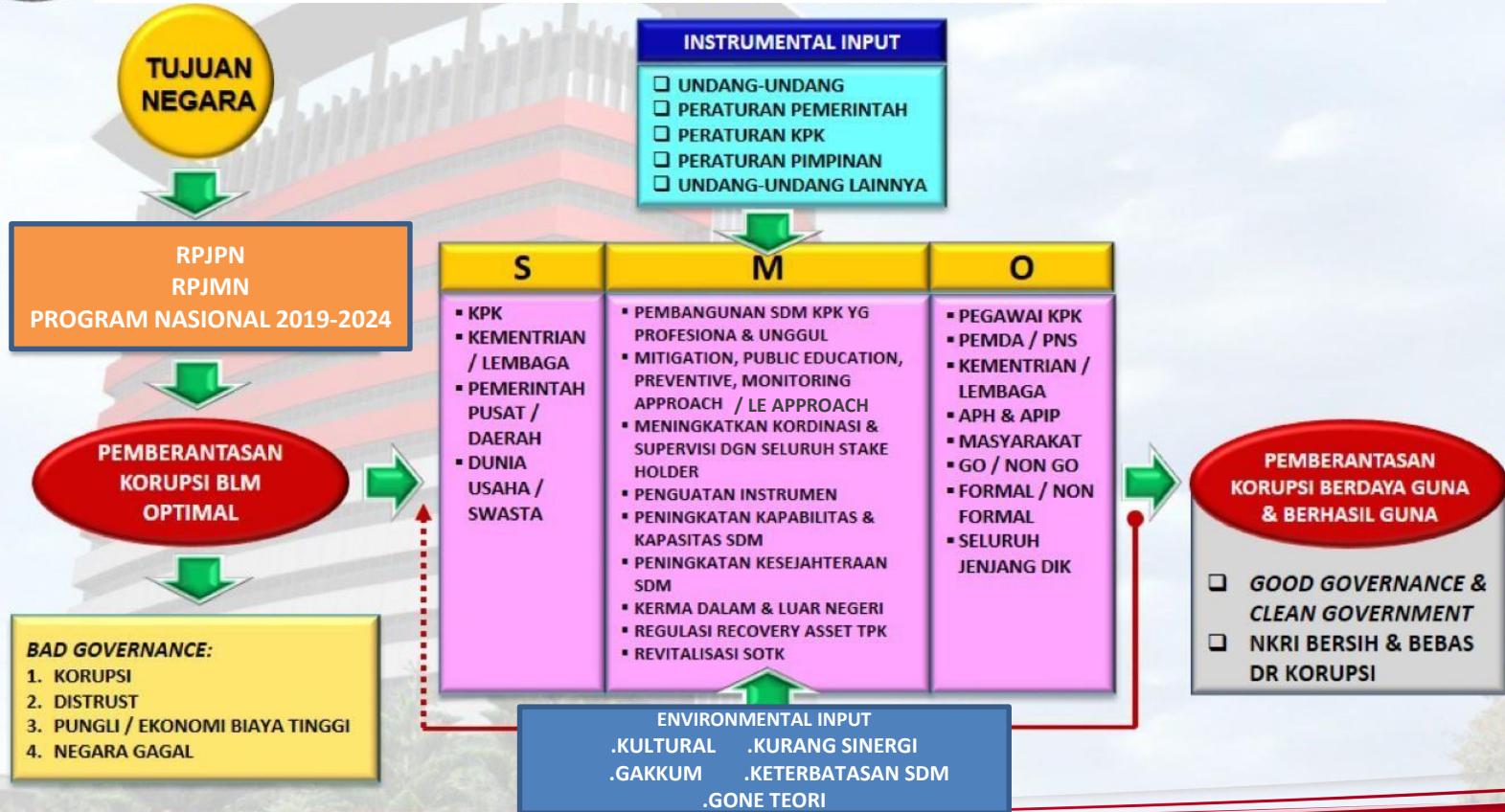
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 2018





PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU

2



2



TUGAS KPK

(UU NO.19 / 2019 Pasal 6)



Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



“Korupsi timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. Untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlakukan kedepannya ”



“ Pemberantasan Korupsi Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dengan **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN** ”

Solusi Pemberantasan Korupsi :

1. By Need Corruption (Perbaikan Kesejahteraan)
2. By Greed Corruption (Pemberian sanksi / hukum yang tegas, penerapan TPPU & pengembalian ASSETT)
3. By System Corruption (Perbaikan system secara integrase : Integrated System dengan e_planning, e_budgeting, e_controlling)
4. Membentuk generasi yang berkarakter anti korupsi dan politik berintegritas
5. Memberdayakan 9 korwil di seluruh provinsi
6. Fokus menjamin terlaksananya Good Governance and Good Government
7. Pencegahan sebelum terjadi

JENIS TIPIKOR (UU No.31 / 1999 Jo.UU No.20 / 2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



2 SUAP-MENYUAP

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d



3 PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pasal 8; 9,10 a,b,c



4 PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g



5 PERBUATAN CURANG

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h



6 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i



7 GRATIFIKASI

Pasal 12B jo Pasal 12C



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

- 1.Merintangi proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2019

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019



65%

PENYUAPAN
602 Perkara



21%

**PENGADAAN
BARANG & JASA**
195 Perkara



5%

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN **47 Perkara**

3%

TPPU **31 Perkara**

3%

PUNGUTAN/PEMERASAN **25 Perkara**

2%

PERIZINAN **23 Perkara**

1%

MERINTANGI PROSES KPK **10 Perkara**



25 dari 34 PROVINSI Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2019

yang ditangani KPK



POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Sumber: Data Penindakan KPK, Juni 2019

MALUKU
6 KASUS

NTB
9 KASUS

NTT
5 KASUS

PAPUA
22 KASUS

KALTIM
17 KASUS

SULUT
10 KASUS

SULSEL
5 KASUS

SULTENG
5 KASUS

SULTRA
8 KASUS

DKI Jakarta
59 KASUS

BANTEN
24 KASUS

JABAR
84 KASUS

JATENG
43 KASUS

JATIM
85 KASUS

BALI
5 KASUS

KALSEL
10 KASUS

KALTENG
4 KASUS

NAD
14 KASUS

SUMUT
60 KASUS

SUMSEL
18 KASUS

SUMBAR
3 KASUS

JAMBI
12 KASUS

RIAU & KEP
45 KASUS

BENGKULU
22 KASUS

LAMPUNG
25 KASUS

TITIK RAWAN KORUPSI di PEMDA



3. Pelaksanaan APBD:

PBJ → *mark-up*,
penurunan spek/kualitas, dan
pemotongan oleh bendahara

1. Perencanaan APBD:

- Pembagian dan pengaturan “jatah proyek” APBD dan Ijon proyek
- Meminta/menerima hadiah/
sesuatu pada proses perencanaan
APBD

4. Perizinan

5. Pembahasan & Pengesahan

Regulasi

6. Pengelolaan pendapatan daerah

2. Penganggaran APBD:

- Pembahasan dan pengesahan RAPBD → “Uang Ketok”
- Dana aspirasi
- Pokir yang tidak sah

7. Rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi Kepegawaian

8. Pelayanan publik

9. Proses penegakan hukum

Kesimpulan: Hulu dari berbagai kasus-kasus korupsi (mayor) di Pemda adalah mahalnya biaya politik (eksekutif dan legislatif)



AREA INTERVENSI PENCEGAHAN KPK

BERANI
JUJURI
HEBAT!

PROGRAM KORSUPGAH KPK

PROGRAM REGULER

1. Perencanaan & Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kapabilitas APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa

PROGRAM TEMATIK

1. Peninjakan Pajak Daerah
2. Penyelamatan Aset Daerah
3. Sumberdaya Alam
4. Pendidikan
5. Kesehatan

TUJUAN UTAMA:



**PENYELAMATAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

FOKUS KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN

- e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi
- Program dan Kegiatan RKPD, Renja SKPD mengacu pada RPJMD
- Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB)

Perencanaan dan Penganggaran

- Pelimpahan 100% kewenangan Informasi perizinan (*online & offline*)
- Aplikasi perizinan Ketersediaan aturan
- Rekomendasi Teknis

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Organisasi ULP yang mandiri
- Pokja Permanen 100%
- Pengadaan Belanja Modal via ULP
- E-Katalog

Pengadaan Barang dan Jasa

- Kecukupan jumlah & kualitas APIP
- Kelembagaan APIP
- Kecukupan anggaran pengawasan
- Melaksanakan workshop APIP

Kapabilitas APIP

- Perbaikan Manajemen APIP
- ANJAB, ABK, EVAJAB
- Implementasi Tunjangan Penghasilan Pegawai

Manajemen SDM

- Publikasi APBDes
- Implementasi SISKEUDES
- Pengawasan Dana Desa

Dana Desa

- Tersedianya database WP
- Tax Clearance
- Inovasi Peningkatan PAD

Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Database BMD yang handal
- Pengamanan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan BMD

Manajemen BMD

- Alokasi tidak fokus pada kepentingan publik
- Hibah dan Bansos yang tidak tepat
- Intervensi pihak luar/dalam

- Penyuapan/ Pemerasan/ Gratifikasi
- Pelayanan yang kurang Perizinan tidak transparan
- Lemahnya pengendalian

- Proses yang tidak transparan
- Mark up harga
- Pemecahan proyek
- Pelaksana tidak independen
- Anggaran pengawasan belum memadai
- Spesifikasi yang berbeda

- Kurangnya jumlah dan kualitas APIP
- APIP yang tidak independen
- Anggaran pengawasan belum memadai

- Lemahnya manajemen SDM
- Penghasilan PNS belum memadai

- Penggunaan Dana Desa tidak handal
- Belum ada inovasi peningkatan PAD
- Kurang tergalinya potensi PAD

- Database Wajib Pajak tidak handal
- Belum ada inovasi peningkatan PAD
- Kurang tergalinya potensi PAD

- Aset tidak dikelola dengan baik
- Potensi BMD dikuasai pihak ketiga

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

1. Tersedianya Aplikasi Perencanaan APBD

Tersedianya aplikasi *e-planning* dan sudah digunakan

2. Terdokumentasinya Pokir, Musrenbang, Forum OPD

Musrenbang, Pokir, Forum OPD diinput dalam *e-planning*

3. Terdokumentasinya RPJMD

Terdokumentasi RPJMD dalam aplikasi *e-planning*
Kesesuaian program dan kegiatan dengan RPJMD

4. Standar Satuan Harga

Tersedia Standar Satuan Harga dan diimplementasikan dalam *e-budgeting*

5. Analisis Standar Biaya

Tersedianya Analisis Standar Biaya dan diimplementasikan dalam *e-planning*

6. Penganggaran APBD

Penyerahan & Pengesahan APBD tepat waktu dan Publikasi APBD

7. Integrasi Perencanaan & Penganggaran APBD

Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi



Bagaimana Mencegah Korupsi di Pemda



KUNCI KEBERHASILAN / KEGAGALAN



PUSAT

- Komitmen dari Pemerintah Pusat/tidak tumpang tindih aturan
- Sinkronisasi aturan di Pusat, seperti pelaksanaan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan , Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi /Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau Surat Edaran turunannya
- Jangan sampai membuat kebingungan para pelaksana di Daerah



DAERAH

- Komitmen Kepala Daerah
- Transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah baik tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan



CAPAIAN TAHUN 2018 DAN 2019

BERANI
JUJUR
HEBAT!



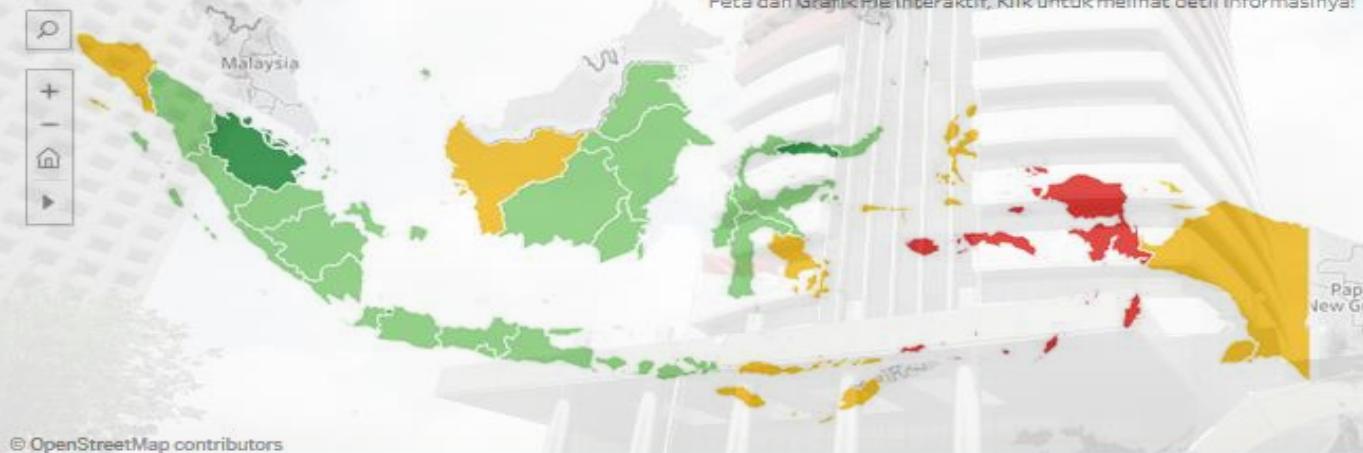
PROGRES RENAKSI KORSUPGAH NASIONAL

TAHUN 2018

Dashboard ini memberikan informasi Progres Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di **TINGKAT NASIONAL** yang dilakukan pada **8 Area Intervensi** tahun **2018**. Progres Korsupgah ini merupakan akumulasi progres Area Intervensi dikali masing-masing bobot.

WILAYAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH	LEGENDA
(All)	(All)	█ 0%-25% █ >25%-50% █ >50%-75% █ >75%-100%

SEBARAN WILAYAH KORSUPGAH



542 PEMERINTAH DAERAH

Pilih :

- Wilayah Provinsi
- Pemerintah Daerah

NO PEMERINTAH DAERAH

1	PEMKAB LAMONGAN	93%
2	PEMKAB PURWOREJO	93%
3	PEMKOT SURABAYA	93%
4	PEMKAB BOYOLALI	92%
5	PEMProv LAMPUNG	92%
6	PEMKAB INDRAGIRI HILIR	90%
7	PEMKOT PADANG PANJANG	90%
8	PEMProv JAWA TENGAH	89%
9	PEMKOT SAWAH LUNTO	88%
10	PEMKAB BANJAR	88%

PROGRES AREA INTERVENSI





PROGRES RENAKSI KORSUPGAH NASIONAL

TAHUN 2019

Dashboard ini memberikan informasi Progres Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di **TINGKAT NASIONAL** yang dilakukan pada **8 Area Intervensi** hingga **16 Januari 2020**. Progres Korsupgah ini merupakan akumulasi progres Area Intervensi dikali masing-masing bobot.

WILAYAH PROVINSI

(All) ▾

PEMERINTAH DAERAH

(All) ▾

LEGENDA

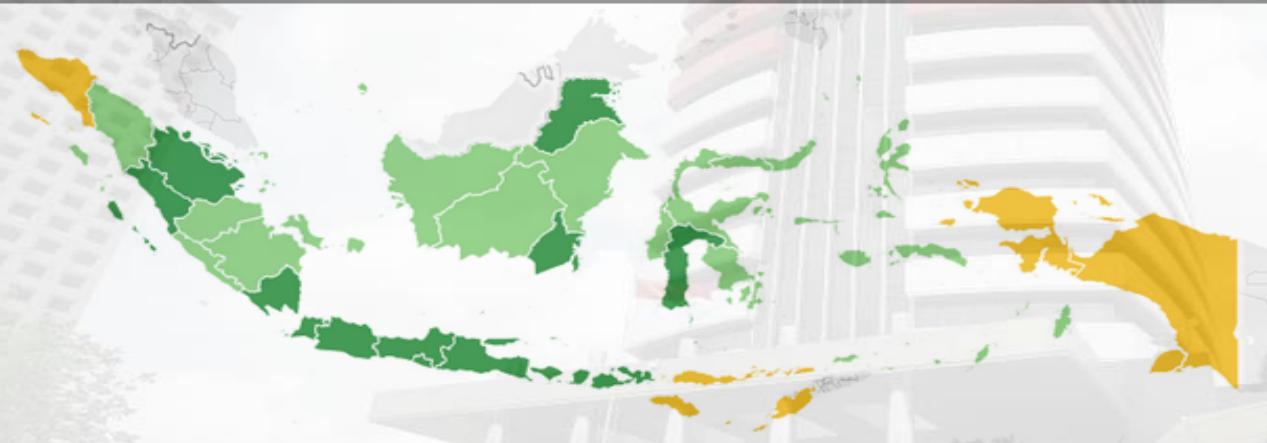
> 25%-50%

> 50%-75%

> 75%-100%

SEBARAN WILAYAH KORSUPGAH

Peta dan Grafik Pie Interaktif, Klik untuk melihat detil informasinya!



© OpenStreetMap contributors

34 WILAYAH PROVINSI

Pilih :

- Wilayah Provinsi
- Pemerintah Daerah

NO	WILAYAH PROVINSI	
1	DKI JAKARTA	91%
2	DI YOGYAKARTA	84%
3	BANTEN	82%
4	JAWA TIMUR	81%
5	JAWA TENGAH	81%
6	RIAU	80%
7	LAMPUNG	79%
8	JAWA BARAT	78%
9	SULAWESI SELATAN	78%
10	KALIMANTAN SELATAN	77%

PROGRES AREA INTERVENSI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD



74%

PENGADAAN BARANG DAN JASA



60%

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



74%

KAPABILITAS APIP



54%

MANAJEMEN ASN



68%

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH



74%

MANAJEMEN ASET DAERAH



69%

TATA KELOLA DANA DESA



59%

(22)



Kontak Kami!

Gedung Merah Putih **KPK**

Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta Selatan - 12950



KomisiPemberantasanKorupsi



@KPK_RI



informasi@kpk.go.id



(021) 2557 8498





BERANI
NYURI
HEBAT!

Terima Kasih

NIVS KORUIT
RIUM ABBRAHMAN
29 FEBRUARI 2020

